



Daftar Rujukan

Jurnal Ilmiah

- Aprilia, Maria, and K. (2016). Analisis Kebijakan Publik Deliberatif Dalam Pembangunan Daerah Di Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Public Policy and Management Review* 5, No. 4, 78–91.
- Azzahra, S. (2020). Persepsi Pengguna Twitter Terhadap Kepribadian Merek Dan Korelasinya Dengan Social Media Engagement. *Jurnal Gama Societa*, Vol.4 No.1., 4.
- Bekkers, V.J.J.M, & Edwards, A. R. (2018). The role of social media in the policy process. In *Handbook of Policy, Process and Governing*.
- Bennett, L. & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action. Digital media and the personalization of collective action. *Information, Communication & Society* 15, 739–768.
- Elfrida, S. V. (2016). Proses Membangun Agenda Setting Kebijakan Pada Portal Berita Pemerintah dan Kesesuaianya dengan Agenda Media Online. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 6, No. 1, 13–26.
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). *Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi*.
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Efektivitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 160–170.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69537>
- Leda, H. A. (2020). *Seksisme dan Kekerasan Seksual di Flores*.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/E9D6N>
- McCay-Peet, L., & Quan-Haase, A. (2016). A Model of Social Media Engagement: User Profiles, Gratifications, and Experiences. In *Why Engagement Matters* (pp. 199–217). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-27446-1_9
- Measured, S. (2014). How to Analyze the Metrics that Matte. *The Complete Guide to Twitter Analytics*.
- Michelle Wolfe, B. D. J. & F. R. B. (2013). A Failure to Communicate: Agenda Setting in Media and Policy Studies. *Political Communication*, 30(2), 175–192.
- Michels, A. dan De Graaf, L. (2010). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policy Making and Democracy. *Local Government Studies*, 36(4), 477 – 491.
- Musyarof, Z. (2019). Analisis Text Mining terhadap BPS di Twitter Menggunakan R. *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Nasionalita, K. (2014). Relevansi teori agenda setting dalam dunia tanpa batas. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 5(2), 156–164.
- Paranta, I. (2019). Polarisasi Politik Menjelang Pemilu 2019: Digital Media dan Ruang Gema. *Digital Media Dan Ruang Gema*.
- Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Towards cyberactivism 2.0? Understanding the use of social media and other information technologies for political activism and social movements. *Government Information Quarterly*, 31, 365–378.
- Sari, N. H. (2014). Penerapan Manajemen Komunikasi Strategik pada Model Demokrasi Deliberasi dalam Menciptakan Kebijakan Publik yang Tepat. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 3(1), 83–101.
- Tremayne, M. (2014). Anatomy of protest in the digital era: A network analysis of Twitter and occupy wall street. *Social Movement Studies*, 18(8), 901–915.
- Van Aelst, P. (2014). 12 Media, political agendas and public policy. *Political Communication*, 18, 231.
- Villanueva, M. J. (2012). Sosial media for sosial change. Dalam Simon Winkelmann (ed). *The Sosial Media (R)Evolution?: Asian Perspective on New Media*, 175–182.
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. *Thousand Oaks, CA: Sage*. Thousand Oaks, California: Sage.



Tesis dan Prosiding

- Lim, M. (2017). Klik yang tak memantik: aktivisme media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 35–50.
- Newswire, A. (2013). *Fortune PR: Empat Tahap Mengukur Efektifitas Kampanye Social Media*.
- Prabowo, M. (2015). *Dinamika Agenda-Setting dan Terbentuknya Reversed Agenda-Setting*.
- Pradana, A. P. (2020). *Aktivisme Siber dan Jejaring Aktor: Studi Kasus Tagar #JogjaOraDidol di Media Sosial Twitter*.

Internet

- 16haktp.com. (2017). *Tentang 16HAKTP*. <https://16haktp.com/tentang-16haktp/>
- BBC.com. (2018). *Setidaknya 2.000 orang meriahkan pawai ratusan meter penghapusan kekerasan seksual*. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46492406>
- Change.org. (2018). *Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama*. <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara>
- Change.org. (2019). *Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)*.
<https://www.change.org/p/dpr-ri-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-p-ks?redirect=false>
- Dpr.go.id. (2019). *Perlu Dialog Untuk Penolak RUU PKS*.
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23754/t/Perlu+Dialog+untuk+Penolak+RUU+PKS>
- Femina.co.id. (2021). *RUU PKS Kembali Masuk Prolegnas DPR 2021, Berikut Pentingnya Segera Sahkan RUU Ini*. <https://www.femina.co.id/trending-topic/ruu-pks-kembali-masuk-prolegnas-dpr-2021-berikut-pentingnya-segera-sahkan-ruu-ini>
- Firmansyah, N. (2019). *Pembahasan RUU PKS di DPR ditunda sampai Pemilu 2019*.
<https://www.alinea.id/nasional/pembahasan-ruu-pks-di-dpr-ditunda-sampai-pemilu-2019-b1Xbp9hLo>
- getdaytrends.com. (2020). *No Title*. <https://getdaytrends.com/indonesia/2020-06-30/15/>
- Indonesia, C. (2020). *Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur pembahasan*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan>
- International, A. (2019). *Toolkit-Menggelar Acara Kampanye “PENA: Pesan Perubahan.”*
<https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2019/09/Toolkit-1.pdf>
- Jpnn.com. (2019). *Untuk Pembuat Petisi Tolak RUU PKS, Simak Nih Penjelasan Bu Reni*.
<https://www.jpnn.com/news/untuk-pembuat-petisi-tolak-ruu-pks-simak-nih-penjelasan-bu-reni>
- Leavey, J. (2013). *Social Media and Public Policy*.
<https://www.alliance4usefulEvidence.org/assets/Social-Media-and-Public-Policy>
- Nasional.kompas.com. (2020a). *Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15141751/alasan-dpr-tarik-ruu-pks-dari-prolegnas-prioritas-2020>
- Nasional.kompas.com. (2020b). *Komisi VII DPR: Bukan Dihapus RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/06525031/komisi-viii-dpr-bukan-dihapus-ruu-pks-digeser-ke-prolegnas-prioritas-2021?page=all>
- Nasional.kompas.com. (2021). *DPR dan Pemerintah Setuju RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prioritas 2021*.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/22174681/dpr-dan-pemerintah-setuju-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-masuk-prioritas>
- Nastiti, A. (2017). *Gerakan Sosial dalam konektivitas digital*.
<https://www.remotivi.or.id/kupas/408/gerakan-sosial-dalam-konektivitas-digital>



MEDIA BARU DALAM DELIBERASI KEBIJAKAN: Studi Tentang Pembahasan Rancangan Undang strip Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual

GISKA ARVELIANA FEBRIANY, Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si.

UNIVERSITAS

GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Theconversation.com. (2020). *Pembahasan RUU PKS:menilik proses dan permasalahan legislasi.* <https://theconversation.com/pembahasan-ruu-pks-menilik-proses-dan-permasalahan-legislasi-142561>

Voaindonesia.com. (2020). *Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Jadi Prioritas 2020?* <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-tak-jadi-prioritas-2020-/5489315.html>.